



RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
Jalan Kenanga Nomor 22 ☎ (0287) 383458 Kode Pos 54361
TAHUN 2023



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNya Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 dimaksudkan menjadi dokumen perencanaan dan menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan Pejagoan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh kata sempurna masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharap saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen untuk kesempurnaan Rencana Kerja dan pelaksanaannya sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Rencana Kerja ini.

Pejagoan, 7 Agustus 2023
KECAMATAN PEJAGOAN

TAMIM SOBRI, S.IP, M.M
Pembina Tingkat I
NID. M. 19670703 198903 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	A. Latar Belakang	4
	B. Landasan Hukum	5
	C. Maksud Tujuan	7
	D. Sistematika Penulisan	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024	9
	B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
	D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	24
	E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
	A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	52
	B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
	C. Program dan Kegiatan	56
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V	PENUTUP	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan Renja-SKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Renja Kecamatan Pejagoan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pejagoan. Kecamatan Pejagoan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya Kecamatan Pejagoan berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tatacara penyusunan Renja Kecamatan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan Visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”*. Kinerja Kecamatan Pejagoan utamanya mendukung Misi ke satu RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah : *“Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi”*.

Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program

dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen periode tahun 2023:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaiman telah diubah beberapa kaliterakhir dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
23. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Pejagoan Tahun sebelumnya (2022).

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pejagoan disusun sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pejagoan, Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah

Bab V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Pejagoan disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Pejagoan saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih yaitu : Capaian Peningkatan Pelayanan PATEN dan Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.

Bahwa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Pejagoan meliputi :

1. Pembuatan KTP;
2. Pembuatan KK;
3. Penerbitan Surat Pindah WNI antar Kecamatan;
4. Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi;
5. Penerbitan Akte Kematian;
6. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar;
7. Pembuatan Akta Kematian;
8. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian
9. Pemberian Rekomendasi BBM;
10. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
11. Legalisasi SKCK;
12. Pemberian Legalisasi KKN, Survey dan Penelitian;
13. Pemberian Legalisasi Proposal;
14. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris; dan
15. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk Keluar Daerah.

Renja Kecamatan Pejagoan Tahun lalu, yaitu tahun 2022 harus dievaluasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan Tahun Lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2023 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Tahun 2022. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

a) Review Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Kecamatan Pejagoan melaksanakan 4 (empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dengan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.224.926.000,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/Kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 100% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 91,99% atau sebesar Rp. 2.046.928.181,00. Program dan kegiatan Kecamatan Pejagoan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.sebagai berikut :

Tabel 2.1
Review Realisasi Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2022

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.001.426.000,00	1.832.927.933,00	70,89
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.999.600,00	99,99
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.999.700,00	99,99
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.999.900,00	99,99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.856.006.000,00	1.682.416.999,00	90,65
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	1.836.006.000,00	1.662.510.197,00	90,55
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	19.906.802,00	99,53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.500.000,00	35.459.600,00	99,89
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	100
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.960.000,00	99,67
	3. Penyediaan Barang Cetak dan	5.000.000,00	4.999.600,00	99,99

	Penggandaan			
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	5. Penyediaan Bahan Material	8.000.000,00	8.000.000,00	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	9.969.000,00	99,69
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.969.000,00	90,96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.000.000,00	33.215.105,00	89,77
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	990.000,00	99,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	17.000.000,00	13.225.105,00	77,79
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.920.000,00	55.867.629,00	98,15
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	36.000.000,00	34.948.129,00	97,08
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.499.500,00	99,98
	3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.420.000,00	18.420.000,00	100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	65.000.000,00	64.999.900,00	99,99
		65.000.000,00	64.999.900,00	99,99
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	65.000.000,00	64.999.900,00	99,99
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	20.000.000,00	19.999.900,00	99,99

	Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	19.999.900,00	99,99
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000,00	19.999.900,00	99,99
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	128.500.000,00	128.024.448,00	99,63
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128.500.000,00	128.024.448,00	99,63
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	28.000.000,00	27.528.294,00	98,32
	2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa.	23.000.000,00	22.999.500,00	99,99
	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.500.000,00	17.500.000,00	100
	4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000,00	20.000.000,00	100
	5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.000.000,00	19.997.800,00	99,99
	6. Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	20.000.000,00	19.998.854,00	99,99
	Total Anggaran dan Realisasi	2.224.926.000,00	2.046.928.181,00	91,99%

Tabel tersebut diatas adalah gambaran review capaian realisasi kinerja dan capaian keuangan pada tahun 2022 dan rata-rata Akumulasi pencapaian realisasi dari total anggaran dibagi realisasi 100%.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan dan
Pencapaian renstra Kecamatan Pejagoan s/d Tahun 2023

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Pejagoan) pada akhir Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01	01				KECAMATAN									
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	100%	100%						
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA dan Renstra 2024	55	10	10	10	100	10	10	72,73%
7	01	01	2.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang tersusun	30	6	6	6	100	6	6	72,73%
7	01	01	2.01	01	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan DataPerangkat Daerah	25	4	4	4	100	4	4	72,73%
7	01	01	2.01	02		Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi	100%	100%						

1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
						Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	72 bulan	72	12	12	100	12	60	83,33%
7	01	01	2.01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	72 bulan	36	12	12	100	12	60	83,33%
7	01	01	2.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung kantor	72	36	12	12	100	12	60	83,33%
7	01	01	2.01	06	03	Penyediaan bahan logistic Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makan dan Minum Rapat	72	36	12	12	100	12	60	83,33%
7	01	01	2.01	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	72	36	12	12	100	12	60	83,33%
7	01	01	2.01	06	06	Peyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	72	36	12	12	100	12	60	83,33
7	01	01	2.01	06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	72	36	12	12	100	12	60	83,33

1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
7	01	01	2.01	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	36	12	12	100	12	12	83,33
7	01	01	2	07		Pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah								
7	01	01	2	07	02	Pengadaan kendaraan Dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit Pengadaan kendaraan Dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	01	2			Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit Pengadaan peralatan mesin lainnya	8	2	2	2	100%	3	7	87,5%
7	01	01	2			Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2			Penyedia Jasa surat menyurat	Jumlah bulan Penyedia Jasa surat menyurat	72	36	12	12	100%	12	60	83,33%
7	01	01	2			Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit	72	36	12	12	100%		60	83,33%
7	01	01	2			Penyedia Jasa Pelayanan Kantor dan Umum	Jumlah Penyedia Jasa Kebersihan kantor	72	36	12	12	100%		60	83,33%
							Jumlah orang petugas kebersihan								
7	01	01	2			Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit Pemeliharaan penyedia jasa barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah								

1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
7	01	01	2			Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72	48	6	6	100%	6	36	75%
7	01	01	2			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	48	40	8	8	100%	8	48	100%
7	01	01	2			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin /Berkala Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7	01	01	2			Program penyelenggara Pemerintah dan Pelayanan Publik	Prosentase cakupan penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%						
7	01	01	2			Pelaksanaan urusan pemerintah yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintah yang di limpahkan kepada Camat	100%	100%						
7	01	01	2			Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizina non usaha	Jumlah jenis pelayanan Perzinan yang di fasilitasi	78	48	13	13	100%	13	74	94%
7	01	01	2			Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan non perizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	78	48	13	13	100%	13	74	94%
7	01	01	2			Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban		100%	100%						
7	01	01	2			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		100%	100%						
7	01	01	2			Sinergitas dengan		1	0	0	0	100%	1	1	100%

1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
						kepolisian Negara RepublikIndonesia. Tetara nasioal Indonesia dan Intensi Vertikal di wilayah Kecamatan									
7	01	01	2			Program penyelenggara Pemerintah Umum	Prosetase Program penyelenggara Pemerintah Umum	100%	100%						
7	01	01	2			Penyelenggara urusan Pemerintah Umum	Penyelenggara urusan Pemerintah Umum Sesuai penugasan kepala Daerah								
7	01	01	2			Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pancasila, pelaksanaan Undang undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal Ika Serta pemertahanan dan pemeliharaan kesatuan Negara Republik Indonesia	Jumla event dalam rangka pembinaan waasan kebangsaan	24	20	2	2	100%	0	22	91,66%
7	01	06				Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	Prosentase Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	100%	100%						
7	01	06	2.01			Fasilitasi Rekomendasi dankoordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Rekomendasi dankoordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%						
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumla desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa Pendayagunaan aset	78	52	13	13	100%	13	65	83,33%

1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
							desa								
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan	6	2	1	1	100%	1	4	66,66%
7	01	06	2.01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman ketrertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman ketrertiban Umum	0	1	1	1	100%	0	2	0%
7	01	06	2.01	13		Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	Jumlah kegiatan Faslitas musrengbangdes/mu srengbangcam	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7	01	06	2.01	16		Fasilitasi penyusunan da program pelaksanaan pemberdayaanmasyarakat Desa	Jumlah kegitaan Pemberdayan masyarakat Desa	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	06	2.01	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes	3	1	1	1	100%	1	3	100%
							Jumlah Kegiatan Pendampingan Desa								

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa Kecamatan Pejagoan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Sementara fungsi dari kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Fungsi dari Kecamatan disebutkan sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- 2) Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Kinerja Kecamatan Pejagoan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian Program dan Kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berikut ini penyajian penyajian analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pejagoan dapat dilihat pada Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C. 3.0
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Pejagoan			89,88	94,00	94,00	94,00	89,88	85,23	86,00	86,50	

Sumber : Renstra Kecamatan Pejagoan 2021-2026

C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a) Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Pejagoan sampai dengan Tahun 2023 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Pejagoan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kecamatan Pejagoan yang berkaitan dengan tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
 - b. Implementasi pelimpahan wewenang kepada Camat belum semuanya diikuti oleh peraturan atau kebijakan pendukung lainnya sehingga proses pelayanan tidak berjalan efektif;
 - c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksanaan teknis pelayanan PATEN; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN belum optimal.
2. Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), permasalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan ADD dan mayoritas desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya. Upaya yang dilakukan adalah mengenai redaksi penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen dengan melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD dan DD agar tepat waktu dan akuntabel. Namun secara umum pelaksanaan ADD dan DD di Kecamatan Pejagoan tidak ada permasalahan.
3. Pembinaan Perangkat Permasalahan :
 - a. Masih perlu peningkatan SDM Perangkat Desa serta Sarana dan Prasarana yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan efektif dan efisien;
 - b. Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan Urusan pemerintah kurang tertata. Upaya yang dilakukan :
 - ▶ Perlu adanya pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM Perangkat Pemerintahan Desa;
 - ▶ Pengalokasian anggaran Desa untuk kebutuhan sarana dan prasarana administrasi; dan
 - ▶ Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan Narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan Praktisi Hukum.

- Adanya Bencana Nasional Non Alam (Covid – 19) sehingga Perangkat Daerah harus melaksanakan Rasionalisasi Anggaran sejumlah 8% dan digunakan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Untuk mengurangi penyebaran Covid -19 Kecamatan bersama instansi terkait melaksanakan monitoring pelaksanaan PPKM di tingkat desa/Kelurahan , Isoman, Isosat dan memberhentikan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
- Adanya Penyaluran Dana tidak terduga di desa, berupa bantuan keuangan kepada masyarakat terdampak Covid-19 (BST Himbara/Perluasan BST maupun Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa), Sehingga harus melaksanakan monev ke desa – desa.
- Pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Wilayah Kecamatan Pejagoan sudah dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2023 untuk proses pendataan manual sudah selesai 100% dilakukan di 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Pejagoan, sedangkan input ke Aplikasi SDG's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Bentuk Fasilitasi yang dilaksanakan Kecamatan berupa Sosialisasi dan monitoring Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SDG's. Sampai dengan saat ini proses upload data belum maksimal karena adanya kendala di aplikasi yang eror/trobel.
- IKU diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. IKU yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah Menyusun rencana pencapaian, rencana penerapan IKU disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana penerapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi IKU dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah yang mendukung pelaksanaan IKU dalam dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada rincian :

Tabel 2.3
IKU Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	89,88	89,88	94,00	94,00	94,00	94,00	95,00

	Pejagoan								
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rancangan awal penyusunan Renja Tahun 2024 terdiri atas 4 (empat) Program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami beberapa kali perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- a. Adanya peraturan (terutama tentang Nomenklatur dari Permendagri 13 tahun 2006 ke Permendagri 90 tahun 2019) dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Pejagoan. Kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Pejagoan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini yang merupakan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Kecamatan Pejagoan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
					1.594.672.588					2.727.177.368	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Kecamatan Pejagoan	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	1.411.720.228	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Kecamatan Pejagoan	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	1.413.755.228	
	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Dearah	Kecamatan Pejagoan	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	13.390.000	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pejagoan	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	13.390.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pejagoan	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA dan Renstra)	6 dokumen	7.790.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Pejagoan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	5 Dokumen	7.790.000	
	Penyusunan Dokumen evaluasi Perangkat Daerah	Kecamatan Pejagoan	Jumlah Dokumen Evaluasi perangkat Daerah yang disusun (SAKIP, LKPJ, LKjIP dan Dalev)	4 dokumen	5.600.000	Penyusunan Dokumen evaluasi Perangkat Daerah	Kecamatan Pejagoan	Jumlah Dokumen Evaluasi perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	5.600.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan sdministrasi keuangan daerah	100%	1.217.703.228	Administrasi Keuangan	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan sdministrasi keuangan daerah	100%	1.217.703.228	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pejagoan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah	14 orang	1.202.703.228	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pejagoan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah	15 orang	1.202.703.228	

	Pelaksanaan pentausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Pejagoan	Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja keuangan yang disusun	12 dokumen	15.000.000	Pelaksanaan pentausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Pejagoan	Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja keuangan yang disusun	12 bulan, 12 Dokumen	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum	100%	49.538.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum	100%	49.538.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	2.754.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan, 12 Paket	2.754.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor	12 bulan	22.396.000	Penyediaan bahan logistick kantor	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan, 12 Paket	22.396.000	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	3.000.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan, 12 Dokumen	3.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	12 bulan	3.200.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	12 bulan, 12 Dokumen	3.200.000	
	Penyediaan bahan matrial	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan bahan matrial (ATK)	12 bulan	8.000.000	Penyediaan bahan matrial	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan bahan matrial	12 bulan, 12 Paket	8.000.000	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	9.188.000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan, 12 Laporan	9.188.000	
	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	12 bulan	1.000.000	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	12 bulan, 12 Dokumen	1.000.000	
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	47.501.000	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	49.536.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12 bulan	500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12 bulan, 12 Laporan	500.000	
	Penyediaan njasa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan	12 bulan	21.000.000	Penyediaan njasa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan	12 bulan, 12 Laporan	21.000.000	

	Komunikasi Sumber Daya air Listrik		penyediaan njasa Komunikasi Sumber Daya air Listrik			Komunikasi Sumber Daya air Listrik		penyediaan njasa Komunikasi Sumber Daya air Listrik			
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	26.001.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pejagoan	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan, 12 laporan	28.036.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.588.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.588.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional /lapangan	Kecamatan Pejagoan	Jumlah unit pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 unit	49.624.000	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional /lapangan	Kecamatan Pejaoan	Jumlah unit pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 unit	49.624.000	
	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Kecamatan Pejagoan	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan mesin lainnya	8 Unit	6.000.000		Kecamatan Pejagoan	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan mesin lainnya	8 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan Rahabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya.	Kecamatan Pejagoan	Jumlah unit emeliharaan Rahabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya.	2 unit	27.964.000	Pemeliharaan Rahabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya.	Kecamatan Pejagoan	Jumlah unit emeliharaan Rahabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya.	4unit	27.964.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pejagoan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	70.135.360.00	PROGRAM PENYELENGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pejagoan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	1.192.266.140	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pejagoan			70.135.360.00		Kecamatan Pejagoan			1.192.266.140	
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha	Kecamatan Pejagoan	Jumlah Jenis pelayanan Non perizinan yang dilaksanakan	4 dokumen	70.135.360.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha	Kecamatan Pejagoan	Jumlah Jenis pelayanan Non perizinan yang dilaksanakan	4 dokumen	74.207.140	
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan	Kecamatan Pejagoan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	2 laporan	0	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan	Kecamatan Pejagoan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	2 laporan	1.118.059.000	

	Kewenangan lain yang Dilimpahkan		yang Dilimpahkan			Kewenangan lain yang Dilimpahkan		Dilimpahkan			
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pejagoan	Presentase terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	100%	15.172.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				15.172.000	
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pejagoan			15.172.000	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan	Kecamatan Pejagoan	terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	15.172.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan NKRI	Kecamatan Pejagoan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Karnaval hari jadi Kebume4	2 kegiatan	15.172.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan pemeliharaan NKRI	Kecamatan Pejagoan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang undand Dasar NKRI	2 Kegiatan. 60 Orang	15.172.000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA.	Kecamatan Pejagoan	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	105.984.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA.	Kecamatan Pejagoan	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju	100%	105.984.000	
	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	6 Kegiatan	105.984.000	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	6 kegiatan	105.984.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	13 Desa	12.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	13Desa	12.000.000	

			asset desa								
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	1 dokumen	15.000.000	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	1 Dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pejagoan	Jumlah peserta pelatihan ketentraman dan ketertiban umum	1 kegiatan	10.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pejagoan	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 kegiatan	10.000.000	
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kecamatan Pejagoan	Jumlah kegiatan fasilitasi Musrenbangdes/Mus rebangcam	2 kegiatan	15.000.000	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kecamatan Pejagoan	Jumlah kegiatan fasilitasi Musrenbangdes/Mus renbangcam	2 kegiatan	15.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah fasilitasi kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dan Desa (pembinaan PKK,UKS,BUMDES,S osmas)Jumlah fasilitasi pembinaan social	4 kegiatan	33.984.000	Fasilitasi Penyusunan program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	Kecamatan Pejagoan	Jumlah fasilitasi kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dan Desa (pembinaan PKK,UKS,BUMDES,Sos mas)Jumlah fasilitasi pembinaan sosial	4 kegiatan	33.984.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Pejagoan	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan pendampingan penanggulangan kemiskinan	13 desa	15.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Pejagoan	Jumlah desa/kel yang difasilitasi kegiatan pendampingan penanggulangan kemiskinan	13 desa	15.000.000	
	Total				Rp. 1.594.672.588					Rp.2.727.177.368	

E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Pejagoan diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa (Musrenbangkel/des) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2022. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan/desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Tabel 3.2. berikut ini menyajikan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Pejagoan :

Tabel 3.2
Daftar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2024
sebagai Usulan Dana Afirmasi Pengembangan Argobisnis Terpadu (DAPAT)
Tahun 2024

No	INDIKATOR KELUARAN(JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Bibit Kopi	1 Paket	150.000.000	Desa Watulawang, Desa Peniron, Desa Kebagoran	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pengadaan Bibit Kopi untuk PengembanganPerkebunan Kopi dan Peremajaan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Pangan	Proposal
2	Pelatihan Budi Daya Tanaman Kopi	1 Paket	50.000.000	Desa Watulawang, Desa Peniron, Desa Kebagoran	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Budi Daya Kopi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	Pengadaan Pupuk dan Saprodi Lainnya	1 Paket	131.193.000	Desa Watulawang, Desa peniron, Desa Kebagoran	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SGD) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	Proposal

Tabel 3.3
Penyepakatan 10 Daftar Prioritas Usulan Desa / Kelurahan Tahun 2024
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan tahun 2024
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa	SKPD Tujuan	Ran king
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Kecamatan Pejagoan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Kantor dan Pendopo Kecamatan Pejagoan senilai Rp. 3.000.000.000	Kecamatan Pejagoan	Pejagoan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2	05-10-2022	Munarso	Kepala Desa Kedawung	Perhubungan	Usulan ke Perhubungan	Penerangan Jalan Desa Kedawung-Pekeyongan RW 4, RW 5 dan RW 6 sangat diperlukan karena belum ada penerangan yang memadai sebanyak 8 titik Rp. 100.000.000	RW 04, 05 dan RW 06 / Jalan Pekeyongan, Kab. Kebumen	Kedawung	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2
3	06-10-2022	Tunjangsari	Kepala Desa Jemur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan sarpras air bersih berupa sumur bor karena masih banyak lokasi yang kekurangan air bersih sebanyak 2 lokasi Rp. 250.000.000	RW 1 RW 3 dan RW 5, Desa Jemur, Kab Kebumen	Jemur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
4	05-10-2022	Suparyo, S.Sos (Pj. Kades)	Kepala Desa Pejagoan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, 14 Unit @ Rp. 15.000.000 – 210.000.000	Desa Pejagoan , Kab. Kebumen	Pejagoan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	4
5	29-09-2022	Imdad Durokhman, S.E	Kepala Desa Logede	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Aspal Jalan Kabupaten dari Kebulusan-Logede , rusak sepanjang 2000 meter Rp. 900.000.000	Desa Logede, Kab. Kebumen	Logede	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5
6	29-09-2022	H. Romlan Mustofa	Kepala Desa Kebulusan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Antar Desa/Kecamatan di RW 01 sepanjang 352 meter senilai Rp. 200.000.000	Dukuh Kebulusan RW 01 Kab. Kebulusan	Kebulusan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	6

7	03-10-2022	Agus Sujoko, B.A.	Kepala Desa Kewayuhan	Kepala Desa Kewayuhan	Pertanian	Usulan ke Pertanian	Jumlah traktor belum mencukupi untuk lahan pertanian desa kwayuhan sebayak 3 unit traktor 8,5 PK sebesar Rp. 900.000.000	Kewayuhan	Ruang Dinas Pertanian dan Pangan	7
8	06-10-2022	Muh Hasanudin	Kepala Desa Aditirto	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan Poros Aditirto jalan K1 Kabupaten, Ruas Jalan Desa Karangpoh-Desa Aditirto sepanjang 3000 meter Rp.2.500.000.000	RW 02 RW 01, Kab. Kebumen	Aditirto	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8
9	06-10-2022	Susanto, SH	Kepala Desa Karangpoh	Pertanian	Usulan ke Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani karena sulitnya akses jalan menuju lokasi pertanian sepanjang 450 meter Rp 200.000.000	Dukuh Kesumen, Desa Karangpoh, Kab. Kebumen	Karangpoh	Dinas Pertanian dan Pangan	9
10	06-10-2022	Sarikum, S.M.	Kepala Desa Kebagoran	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Jalan Desa, ada lokasi yang membutuhkan untuk pembangunan jalan desa sebagai akses perekonomian sebanyak 1 Unit Rp. 200.000.000	RT 006 RW 002 Kab. Kebumen	Kebagoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap perangkat daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan – kebijakan Nasional. Telaah terhadap Kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Visi dan misi Kecamatan Pejagoan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2026. Semua program kegiatan di Kecamatan Pejagoan dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Kebumen yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Pejagoan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen pelayanan PATEN di Kecamatan lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Pejagoan harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN;
7. Adanya Bencana Nasional Non Alam (Covid – 19) yang dimungkinkan masih ada, langkah yang akan dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku kepentingan (*Stake Holder*) terkait dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid 19;
8. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Wilayah Kecamatan Pejagoan.

Dari 13 desa dan telah menganggarkan untuk kegiatan pengentasan penanggulangan kemiskinan minimal 8% dari APBDes dan melaksanakan rapat koordinasi, moniotoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;

Disamping melaksanakan program kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Pejagoan juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan tugas pelayanan kecamatan yaitu :

1. Pelayanan KK dan KTP

Untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Pejagoan adalah pelayanan perekaman KTP elektronik, KK, Akhte Kematian, akhte kelahiran dan KIA

2. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan

Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan program kegiatan SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di Wilayah Kecamatan Pejagoan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2021 - 2026, maka Tujuan dari Kecamatan Pejagoan adalah “Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*)”. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Pejagoan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C. 3.0
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejagoan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Pejagoan			89,88	94,00	94,00	94,00	89,88	85,23	86,00	86,50	

C. Program Dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1) Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pejagoan secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2) Pencapaian SDGs

Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan : (1) Lingkungan; (2) Sosial; dan (3) Ekomomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Pejagoan dalam Renja Tahun 2024 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian, sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya. Penetapan SDGs sudah dilaksanakan oleh semua desa di Wilayah Kecamatan Pejagoan melalui musyawarah desa (Musdes) dan dibuatkan acara.

3) Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,pakaian, tempat berlindung, Pendidikan dan Kesehatan.

D. Program dan Kegiatan

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan

Rencana kerja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 mencakup 4 (empat) program yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan

			Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/Material
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

			Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum
			Fasilitasi Perencanaan Partisipasif	Penyusunan Pembangunan
			Fasilitasi dan Pelaksanaan Masyarakat Desa	Penyusunan Program Pemberdayaan
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

b) Pagu Indikatif

Dana /pagu indikatif untuk Program dan Kegiatan Kecamatan Pejagoan Tahun Anggaran 2024 Rp. 2.727.177.368 dengan perincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.411.720.228,00	DAU
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	13.390.000,00	DAU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.790.000,00	DAU
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000,00	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.217.703.228,00	DAU
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.202.703.228,00	DAU
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.538.000,00	DAU
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.754.000,00	DAU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.396.000,00	DAU
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	DAU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.200.000,00	DAU
	Penyediaan Bahan Material	8.000.000,00	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.188.000,00	DAU
	Penatausahaan Arsip Dinamis	1.000.000,00	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	DAU
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	-
	Pengadaan Mebel	0,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnua	0,00	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.536.000,00	DAU

	Penyediaan Jasa Surat	500.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA da Listrik	21.000.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.036.000,00	DAU
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	83.588.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.624.000,00	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	DAU
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.964.000,00	DAU
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.192.266.140,00	DAU
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	1.192.266.140,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	74.207.140,00	DAU
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Non Perizinan	1.118.059.000,00	DAU
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.172.000,00	DAU
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	15.172.000,00	DAU
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.172.000,00	DAU
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	105.984.000,00	DAU
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	105.984.000,00	DAU
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000,00	DAU
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00	DAU
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	DAU
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000,00	DAU
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	33.984.000,00	DAU
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.000.000,00	DAU

Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program / kegiatan pagu indikatif.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 5 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan antara Lain :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sejumlah 2 Sub Kegiatan yaitu;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan sejumlah 2 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah sejumlah 6 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah 3 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah 3 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

- a) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sejumlah 2 Sub Kegiatan;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan :
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ;

- a) Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan diantaranya;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEJAGOAN

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Kebumen telah memasuki tahapan Kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan tahap ketiga pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 pembangunan lima tahunan Rencana Pembangunan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini :

TABEL 6.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2.727.177.368,00				3.141.098.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.413.755.228,00				1.788.200.000,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13.390.000,00				17,000,000,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renja RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2024)	Jumlah dokumen perencaaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan	100 %	5 Dokumen	11 dokumen	7.790.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10.000.000,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun(LKJIP, LKPJ, SAKIP, DALEV)	Jumlah dokumen perencaaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan	100 %	6 Dokumen	11 dokumen	5.600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.217.703.228,00				1.582.000.000,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan	100 %	48 Orang	12 bulan	1.202.703.228,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.560.000.000,00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan	100 %	4 dokumen	12 bulan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								49.538.000,00				41.000.000,00	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan	100 %	4 Jenis	12 bulan	2.754.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.000.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat SKPD	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan	100 %	12 Bulan	12 bulan	22.396.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12.000.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan	100 %	12 bulan	12 bulan	3.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangani Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 bulan	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.000.000,00
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.000.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5Orang/Bula	n12 bulan	9.188.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.000.000,00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 bulan	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				0	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49.536.000,00				53.200.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 bulan	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.200.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoanr, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 bulan	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	28.036.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83.588.000,00			95.000.000,00		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	6 unit	6 unit	49.624.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55.000.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	7 unit laptop, 6 unit printer, 4 unit PC	7 unit laptop, 6 unit printer, 4 unit PC	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	4 unit	27.964.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	40.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1.192.266.140,00			1.183.059.000,00		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								1.192.266.140,00			1.183.059.000,00		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan	85 %	9 Jenis	9 jenis	74.207.140,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	85 %	65.000.000,00

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	1.118.059.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 %	1.118.059.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								15.172.000,00				20.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								15.172.000,00				20.000.000,00	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoanr, Semua Kelurahan	100 %	2 kegiatan 60 orang	2 kegiatan 60 orang	15.17.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	20.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								105.984.000,00				149.839.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								105.984.000,00				149.839.000,00	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	24,05 %	13 Desa	13 Dokumen	12.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 %	30.000.000,00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	24,05 %	13 Desa	13 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 %	0
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa SKPD	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan,, Semua Kelurahan	24,05 %	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 %	25.000.000,00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Jumlah peserta pelatihan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoanr, Semua Kelurahan	24,05 %	1 Dokumen	1 kegiatan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 %	28.000.000,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Jumlah kegiatan fasilitasi Musrenbangdes/kec	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoanr, Semua Kelurahan	24,05 %	2 Dokumen	2 kegiatan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 %	22.000.000,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Jumlah fasilitasi kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	Kab. Kebumen, Kec. Pejagoan, Semua Kelurahan	24,05 %	13 Desa	13 Desa	33.984.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 %	22.839.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Jumlah desa/kel yang difasilitasi kegiatan pendampingan penanggulangan kemiskinan	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	Kab. Kebumen, Kec.Pejagoan, Semua Kelurahan	24,05 %	2 Kegiatan	2 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 %	22.000.000,00

TOTAL	2.727.177.368,00					3.141.098.000,00
-------	------------------	--	--	--	--	------------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Pejagoan dalam memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pejagoan maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pejagoan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kecamatan Pejagoan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting yang Perlu mendapat Perhatian

Bahwa dengan adanya pandemic Covid-19 memberikan dampak yang besar baik secara ekonomi maupun sosial. Berbagai upaya penanganan dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan BPNT, PKH dan Jaring Pengaman Sosial Kabupaten, Bantuan Provinsi serta bantuan yang dianggarkan dari Dana Desa. Namun untuk saat ini pandemic Covid-19 sudah mulai sedikit demi sedikit walaupun masih ada beberapa daerah yang masih terimbas masih tetap menjaga proses.

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Pejagoan melalui sektor pariwisata beberapa desa di Kecamatan Pejagoan berupaya mengembangkan obyek wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada setidaknya mampu dikenal dan dapat menjadi tujuan wisata lokal masyarakat kabupaten Kebumen. Beberapa obyek wisata yang sedang dirintis pengembangannya antara lain : Wisata Kampung Etnik di Desa Pejagoan, Wisata Bukit Pranji di Desa Watulawang, Adventure Brujul di Desa Peniron dan Wisata Air Kolam Permandian Gading di Desa Pejagoan.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Kebumen. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 tidak lepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati yang berkepentingan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Pejagoan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan Tahun

2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

- 2) Kecamatan Pejagoan berkewajiban untuk Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pejagoan Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Kebume Tahun 2024; dan
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2024.

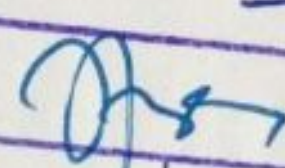
c. Rencana Tindak Lanjut

Pemerintah Kecamatan Pejagoan memandang masih perlunya penanganan/pencegahan Pandemi Covid -19 terus dilakukan untuk mencegah semakin luasnya wabah dan dampak Covid-19. Pentingnya terus menggerakkan kesadaran masyarakat ditengah-tengah masyarakat yang mulai bosan dengan situasi pandemi agar tetap memiliki kepatuhan dengan protokol Kesehatan dalam menjalankan semua aktifitas, misalnya dengan pelayanan umum, kegiatan rapat-rapat kemudian sarana penunjang seperti penyediaan thermo gun, sarana cuci tangan, hand sanitizer, penerapan kewajiban memakai masker dan pembatasan interaksi. Melalui Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Pemerintah Kecamatan Pejagoan memfasilitasi entry Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada masing-masing Desa, Pemerintah kecamatan Pejagoan juga mendorong Pemerintah Desa untuk mengembangkan desa wisata di beberapa desa di wilayah Kecamatan Pejagoan yang sudah dirintis.

Rencana Kerja Kecamatan Pejagoan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pejagoan. Renja Kecamatan Pejagoan juga memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan peyusunan rencan kerja dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Pejagoan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi mencapai visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Kebumen serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupeten Kebumen.

Pejagoan, 7 Agustus 2023

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Hantari Mahadewi	
Cahyo Riyadi	


TAMIM SOBRI, S.IP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670703 198903 1009

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2022 dan lampirannya;
2. Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2022.
3. Notulen Musrenbangcam Tahun 2022.

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
DI KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Selasa tanggal Lima belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi oleh Camat, OPD dan BUMDESMA Kecamatan Pejagoan, Tim Monitoring Musrenbang RKPD Kabupaten, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan Pejagoan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang RKPD di Kecamatan Pejagoan, maka pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Jam : Pkl. 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Gedung serbaguna Dea Keputusan Kecamatan
Pejagoan

Musrenbang RKPD di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

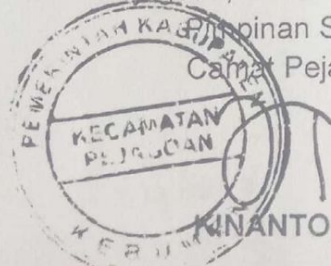
MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

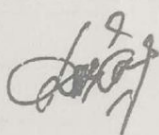
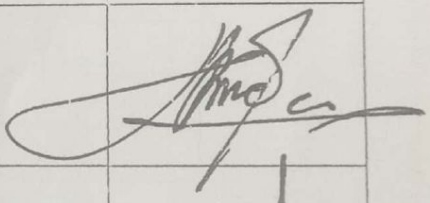
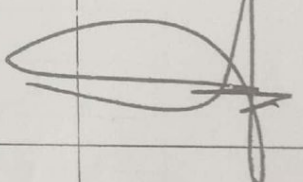
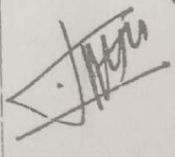
Pejagoan, 15 November 2022

Pimpinan Sidang
Camat Pejagoan



KUNANTO, S.IP

Menyetujui,
Wakil Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1		DPRD		
2	DWI AGUS CAHYONO	Unsur Perangkat Daerah		
3	EDY SUPRAYOGI	Unsur Kecamatan		
4	H BARDANI	Unsur Lembaga		
5	AMIN KUSDARMONO	Unsur Masyarakat/ LSM		
6	NANDA OKTAVIA RAMADHANI	Unsur keterwakilan disabilitas, forum anak kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan	KEDAWUNG	

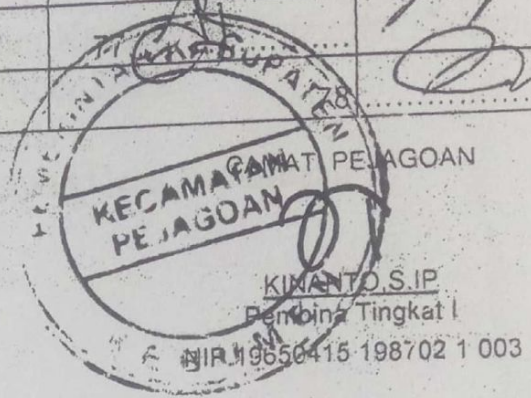
DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 15 November 2022
 Tempat : Gedung Serbaguna Desa Kebulusan
 Acara : Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Pejagoan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Desa Pejagoan			
1	Puji Purnomo	Ketua RW 07	1.
2	Heru Wijayanto	Kader	2.
3	Siti Sunaryati	PKK	3.
4	Suharyanto	PKK	4.
5	M. Husein Wason	BPD	5.
6	Kharis Nugroho	Bakti	6.
Desa Kedawung			
7	Munargo		7.
8	Purwan		8.
9	SIK Solichah	Ketua PKK	9.
10	Siti Umar Khuzaimah		10.
11	Rochmah M.H.	Peranggot	11.
12	SULWARTO	BPD	12.
Desa Kewayuhan			
13	KARTIMAN	CRMO	13.
14	ABUS SUJOTO	WADER	14.
15	Pirin Budi Hartini	PKK	15.
16	AGUSMAN		16.
17	Ahmad Masruri	BPD	17.
18	Nana Hanafi		18.
Desa Logede			
19	Watirah	PKK	19.
20	Fapida. H	Nani Lenger	20.
21	Wanino Ali	KPMB	21.
22	S. Ariy Eleni	BPD	22.
23	Landed D	Kader	23.
24	Ratna Desita	PKK	24.
Desa Kebulusan			
25	R. MUSTOFA		25.
26	Pri Ariest	Tomas	26.
27	Zanet Arifin	LPMD	27.
28	Bardhan	BPD	28.
29	Zenni Ariyanti	PKK	29.
30	Heni Wurnan	PKK	30.
Desa Aditirto			
31	MASHUKI	OPD	31.
32	M. Phoran	Kader	32.
33	Norony MURTOYO	Peranggot Desa	33.
34	M. Husein Wason	BPD	34.

	Desa Karangpoh			
37	Susanto	Kades	37	
38	Yuniorun	PKK	38	A
39	Triana Mulyadi	KPMD	39	Chp
40	Muchtar	LKMP	40	
41	Fik		41	
42	Sang	Sang	42	
	Desa Jemur			
43	Tanjunggar	Kades	43	
44	Dis. Hana Huda	BBPD	44	
45	Nurhayati	PKK	45	Pangin
46	Sri Wahyuni	BPD	46	Shmng.
47	Hasim Nelt	Karangpoh	47	
48	Siti Marfah	Jemur	48	Omj
	Desa Prigi			
49	Muhammad		49	
50	Ali Mashoo	Prigi	50	at
51	Muhimah	KPMD	51	
52	Sam Rerhati	PKK	52	
53	Lmi Ludy Sri		53	
54	Elaron	Sekdas	54	
	Desa Kebagoran			
55	Kurniati	KPMD	55	
56	Raniman	Sekdas	56	
57	M. Hurngfi	PKT	57	
58	Fuli	BPD	58	
59	Gurdan	+ P. RKT	59	
60	SARICUN	Kades	60	
	Desa Pengaringan			
61	Bagi Suroba		61	
62	Agus Riyandi		62	
63	Kawan	Sekdas	63	
64	Gumayyo	Tok mes	64	
65	Sekiman	LKMD	65	
66	Mustiyati D.	BPD	66	
	Desa Peniron			
67	Utangi	BPD	67	
68	Rohmah Yunah	PKK	68	
69	Andi Restu Andi S.	Pemuda	69	
70	Abdono An	Kades	70	
71	KASIDIN		71	
72	Sagiri		72	

	Desa Watulawang			
73	Wanto		73.....	
74	Sri Hartari	Pick	74.....	
75	S. Purwanto		75.....	
76	Suparno		76.....	
77	Sukijan			
78	Supri Deso Supri			





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan Kode pos (54312)

NOTULEN

ACARA : Musrenbangcam Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen
Hari/ Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Gedung serbaguna Desa Kebulusan
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup

PIMPINAN ACARA

Ketua : Sekertaris Camat Pejagoan
Pencatat : Kardi
Peserta : Anggota Dewan Dapil II, Forkompimcam, UPT/Korwil, 6 Delegasi
Desa, PD dan PLD, Dinas Terkait

KEGIATAN RAPAT

1. Pembukaan : Acara dibuka oleh Pembawa Acara
2. Pembahasan : Musrenbang RKPD di Kecamatan Pejagoan.
 1. Pembukaan Dibuka dengan bacaan Bismillah
 2. Laporan Ketua Penyelenggara Musrenbangcam
 3. Sambutan Camat Pejagoan sekaligus Pembukaan acara Musrenbangcam
 4. Acara Inti
 - Pemaparan materi hasil Pra Musrenbangcam RKPD oleh Kasi PM (Pak Sukoyo), selaku Tim Penyelenggara.
 - Tanggapan dan klarifikasi dari seluruh peserta dan narasumber
 - Dari peserta atas nama Totok Aris desa Kebulusan terkait sisa usulan dari 79 usulan di kemanakan, dari Kades Pejagoan menanyakan terkait perubahan program/usulan yang di ganti/dirubah. Di jawab oleh Kasi PM bahwa usualn untuk di anterikan di tahun berikutnya terkait program itu kebijakan dari Desa masing-masing dapat di ganti.
 5. Penyepakatan bersama hasil Musrenbangcam dilanjutkan dengan penunjukan delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.
 6. Penanda tangan Berita Acara.
3. Penutup : Acara ditutup dengan bacaan alhamdulillah.

Notulis


Kardi



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Alamat: Jalan Raya Kenanga Nomor: 22 Pejagoan Telp. 0287) 384 458

E-mail: kecpejagoan3@gmail.com

Website: <https://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id>

Pejagoan, 10 November 2022.

No : 005/ 572

Lamp : -

Perihal : Undangan.

Yth.

Kepada

1. Forkopimcam Pejagoan
2. Ka. UPT/ Korwil
- se - Kecamatan Pejagoan
3. Kepala Desa se Kecamatan Pejagoan

Di -

TEMPAT

Dengan ini kami mohon kehadiran saudara besok pada hari :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022

Waktu : Pk.08.30 Wib

Tempat : Gedung Pertemuan Desa Keputusan Kecamatan Pejagoan

Acara : Musrenbang, RKPD Kab. Kebumen di Kec. Pejagoan tahun 2022

Keterangan : Kepala Desa Hadir beserta: 6 Delegasi Desa dan Membawa Surat Tugas Kolektif

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima

kasih





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PEJAGOAN

Alamat: Jalan Raya Kenanga Nomor: 22 Pejagoan Telp. 0287) 384 458

E-mail: kecpejagoan3@gmail.com

Website: <https://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id>

Pejagoan, 10 November 2022

Nomor : 005/ 573
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth  Monitoring Musrenbang
RKPD Kabupaten Kebumen
Di - TEMPAT

Dalam rangka penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Pejagoan. Dengan hormat mengharap kehadiran saudara besok pada hari :

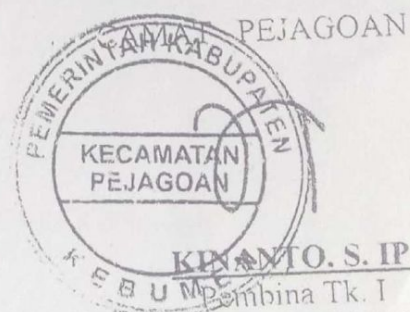
Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022

Waktu : Pk.09.00 Wib

Tempat : Gedung Pertemuan/ Serbaguna Desa Kebulusan
kecamatan Pejagoan

Acara : Musrenbang, RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Pejagoan
tahun 2022

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih



NIP: 196504151987021003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Alamat: Jalan Raya Kenanga Nomor: 22 Pejagoan Telp. 0287) 384 458

E-mail: kecpejagoan3@gmail.com

Website: <https://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id>

Nomor : 896/ 574
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Narasumber

Pejagoan, 10 November 2022

Kepada :
Yth
1. Anggota DPRD Kab. Kebumen Dapil II
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
4. Kepala DPUPR Kabupaten Kebumen
5. Kepala DISTAPANG Kabupaten Kebumen
6. Tim Fasilitator Musrenbang RKPD Kab. Kebumen
7. Korwil/ UPT Dinas Kecamatan Pejagoan
8. Direktur BUMDESMA Kecamatan Pejagoan
9. Ketua LSM Kecamatan Pejagoan
10. PD / PLD Kecamatan Pejagoan
Di -

TEMPAT

Dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Pejagoan, mengharap dengan hormat mengharap kehadiran saudara Sebagai Nara sumber besok pada hari :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022

Waktu : Pk. 09.00 Wib

Tempat : Gedung Pertemuan/ Serbaguna Desa Kebulusan
Kecamatan Pejagoan

Acara : Musrenbang, RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Pejagoan tahun 2022

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih

